

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Novriana Hafizhah

Email : novriana.hafizhah@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Implementation of the policy is a tool of administration of law where various factors, organization, procedures and techniques that work together to carry out the policy in order to achieve the target or goal that is desired. Law no.24 of 2011 concerning the social security agency is the regulation for protect the workforce. Which becomes the attention of major in the study of this is the policy of employment social security by law no.24 of 2011, which become the problem is there are companies that have not registered their workers as participants BPJS Employment. The purpose of this study is to determine the implementation and inhibiting factors of employment social security policy in Pekanbaru. The concept of the theory which is used the theory of the implementation of the policy by Charles O' Jones (Agustino, 2017) is an organization, interpretation and application. Research is using the methods of descriptive qualitative by using technique purposive sampling with the technique of collecting data on observation, interviews and documentation. The result of this study indicate that the implementation of the employment social security policy in Pekanbaru still not optimal, especially in the criteria of interpretation and application. The factors inhibiting is lack of education and socialization that is done by BPJS Employment and communicating against the company which led to a lack of knowledge and information that received by the workers.

Keywords: *Implementation, Policy, Employment Social Security Agency*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap tenaga kerja wajib diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dengan mendirikan PT Jamsostek (Persero) yang mana pada tahun 2014 bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 14 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terbagi dua, yaitu pekerja PU (Penerima Upah) dan BPU (Bukan Penerima Upah). Pekerja PU (Penerima Upah) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Pekerja pada kategori ini merupakan para pekerja yang bekerja pada sektor formal diantaranya PNS, anggota Polri, anggota TNI, dan pegawai swasta. Sedangkan pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Pekerja pada kategori ini merupakan para pekerja yang bekerja pada sektor informal diantaranya nelayan, tukang ojek, pedagang pasar, petani, dokter dan sebagainya.

Adapun fenomena yang terjadi adalah masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan selain itu kurangnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya manfaat program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan serta kurangnya sosialisasi dan edukasi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaring peserta di seluruh kota Pekanbaru.

Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis
Mengembangkan ilmu yang didapatkan serta menambah pengetahuan dan wawasan pembaca yang berkaitan dengan bahasan penelitian ilmiah, yaitu Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru
- b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kedepannya untuk BPJS Ketenagakerjaan lebih baik lagi dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

2.2. Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart Jr implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output),

yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Jones melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni :

- a. Organisasi yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Van Metter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2.3. Jaminan Sosial

Wikipedia jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

2.4. Tenaga Kerja

Payaman Simanjuntak tenaga kerja (man power) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur atau usia.

S. Mulyadi bahwa tenaga kerja (man power) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Dengan lokus Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota. Peneliti memilih Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota dikarenakan wilayah cakupan kepesertaannya lebih luas.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Namun, dengan adanya keterbatasan penelitian yang berkaitan

dengan waktu, kemampuan dan keterkaitan dengan judul peneliti yang dikarenakan kondisi pandemi Covid19, maka peneliti menetapkan informan sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.
2. Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.
3. Perusahaan di Kota Pekanbaru
4. Pekerja/Buruh di Kota Pekanbaru.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan wawancara langsung yang berkaitan dengan penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Pekanbaru. Adapun data primer ini peneliti peroleh dari informan yang peneliti wawancarai. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, serta hasil laporan dan penelitian terdahulu (jurnal), dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah. Data yang diperoleh dalam rangka mendukung dan mencari jawaban pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data, atau hanya menjadi non partisipan (pengamat) (Creswell, 2010:167). Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

2. Interview (Wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan informan. Sehingga memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi yang peneliti sajikan ada pada lampiran dan peneliti dapat pada saat penelitian berlangsung.

3.6 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan

linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scanning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.
2. Tahap kedua, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru, dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.
3. Tahap Ketiga, peneliti lakukan dengan men-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data yang didapat

berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan fenomena yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota.

4. Tahap keempat, peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.
5. Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru

4.1.1 Organisasi

Organisasi yang dimaksud yaitu pembentukan dan penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Yang dimaksud adalah tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari

pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Didalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggungjawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai struktur organisasi dapat disimpulkan bahwa tanpa struktur organisasi program tidak akan bisa jalan dengan baik. Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan regulasi dari undang-undang BPJS Ketenagakerjaan, karena didalamnya sudah ada orang-orang yang terbagi dalam bidang-bidangnya untuk menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Kesiapan dan Pembagian Wewenang

Mengenai kesiapan dan pembagian kewenangan antar bagian di BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan regulasinya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kesiapan dan pembagian wewenang sudah dilaksanakan sesuai regulasi dari Undang-Undang. Personil BPJS Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan dinas setempat mengenai masih banyaknya pekerja yang belum mendapatkan perlindungan dengan melakukan pendekatan dengan perusahaan.

c. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kebijakan, jika personil bertanggung jawab mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Disamping itu, harus ada ketetapan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang harus dikerjakan. Untuk itu personil atau anggota pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, harus mengetahui kendala yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sudah ada bidang-bidangnya baik internal maupun eksternal (lapangan). Personil pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sudah dibekali ilmu pengetahuan tambahan pada saat terjun langsung lapangan, mengingat banyaknya perusahaan yang ada dipekanbaru pastinya personil dibekali dengan pengetahuan agar tujuan dan sasaran tercapai.

4.1.2 Interpretasi

Interpretasi yang dimaksud yaitu penafsiran terhadap UU No.24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ini menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan dengan baik. Agar rencana dan pengarah dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab pada program tersebut. Kemudian, orang-orang yang bertanggung jawab pada program tersebut juga harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Serta dilihat pula apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan regulasi dari UU tentang BPJS Ketenagakerjaan.

a. Tujuan

Pada dasarnya setiap program yang dijalankan baik oleh pemerintah (pusat dan daerah), swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tentu ada yang menaungi dan mengelola jalannya program tersebut. Dimana hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sehingga mampu mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan program dari BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah berjalan dengan baik, dengan sudah di bentuknya bidang-bidang pelaksana, pembekalan ilmu pengetahuan tambahan untuk personil atau tim BPJS

Ketenagakerjaan yang turun langsung kelapangan. Hal ini akan memberikan dampak positif kedepannya dalam melaksanakan tugas. Dikarenakan tugas masing-masing penanggung jawab telah diketahui seperti kesiapan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program.

b. Manfaat

Pekerja atau perusahaan di Kota Pekanbaru yang mendaftarkan diri sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan merasakan manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja dari resiko-resiko sangat berguna di masa depan. Pekerja memiliki tabungan di hari tua yang bisa di ambil ketika pekerja sudah tidak lagi bekerja (keluar atau PHK), jaminan pensiun yang dibayarkan tiap bulan, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

c. Implementor atau Pelaksana Program

Pelaksana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan membentuk bidang-bidang yang dapat melancarkan program yang akan dilaksanakan, diantaranya bidang kepesertaan, bidang

pelayanan, bidang keuangan dan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya implementor yaitu BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan telah berjalan sebagaimana mestinya. Sudah ada bidang-bidang yang mengatur berjalannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan baik. BPJS Ketenagakerjaan juga sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan memberikan perlindungan kepada pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iurannya, sehingga dapat merasakan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

d. Peran

Peran yang dimaksud dalam interpretasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan atau bentuk kerjasama dari BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa peranan pemerintah kota juga sangat berpengaruh dalam tujuan tercapainya program perlindungan tenaga kerja di Kota Pekanbaru. Kerjasama antara Disnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan masih kurang optimal.

Lalu selain Disnaker, BPJS Ketenagakerjaan juga bersama dengan Mal Pelayanan Publik

(MPP). Melalui Mal Pelayan Publik bagi setiap orang yang mengurus izin usahanya sudah harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah kota mengajak seluruh non aparatur sipil Negara untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sangat membantu demi terselenggaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

e. Dampak

Kendala yang dimaksud adalah bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mengatasi pekerja yang masih belum mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masih adanya perusahaan-perusahaan besar yang belum mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Mengatasi masalah tersebut implementor bekerja sama dengan pemerintah kota, sehingga implementor memberikan sanksi berupa sanksi administratif.

4.1.3 Aplikasi (Penerapan)

Aplikasi atau penerapan yang berkaitan dengan pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu pelaksanaan program menjalankan tugasnya untuk

mengelola suatu pekerjaan dengan baik.

a. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud dalam aplikasi disini adalah untuk mengetahui bagaimana mempersiapkan perencanaan yang matang agar program tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan SOP.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan terkait tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan SOP, dikarenakan ada payung hukum dalam pelaksanaan program jaminan sosial tersebut.

b. Kinerja

Kinerja yang dimaksud adalah langkah-langkah yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selaian itu penerapan sanksi yang apabila ada perusahaan atau tenaga kerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan target apakah sudah sesuai dengan SOP.

Untuk memperkenalkan dan memberikan informasi tentang jaminan sosial kepada perusahaan, badan usaha dan lain-lain, maka diperlukan sosialisasi. Sosialisasi dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesadaran pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan

bahwa kinerja dari langkah-langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga memberikan sanksi sudah berjalan optimal. Akan tetapi dalam pencapaian target program jaminan sosial ketenagakerjaan belum tercapai.

c. Koordinasi

Koordinasi sangat penting agar tercipta hubungan yang baik dengan pihak yang terlibat. Selain itu, dengan koordinasi dapat mengetahui kendala personil untuk mengajak pekerjaanya bergabung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari hasil wawancara dianalisis bahwa koordinasi yang dilakukan secara rutin masih belum berjalan optimal dari setiap kegiatan ataupun pada saat berakhirnya fase program. Dikarenakan masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

d. Jadwal Kegiatan

Peneliti mengkonfirmasi kegiatan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jadwal kegiatan untuk menjalankan program jaminan sosial sudah ada jadwal bagian masing-masing bidangnya dan setiap bulannya akan melakukan evaluasi apakah mencapai target atau tidak. Prosedur kegiatan itu ada di

dinas tenaga kerja. Implementor yaitu BPJS Ketenagakerjaan hanya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap peserta dan tenaga kerja serta memberikan banyak manfaat bagi peserta dan tenaga kerja.

4.2 Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru

4.2.1 Edukasi dan Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa edukasi & sosialisasi kepada perusahaan masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya perusahaan & pekerja tidak tahu manfaat dari program jaminan sosial. Dan juga banyaknya masyarakat yang masih menyamakan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Selain itu dikarenakan perusahaan menetapkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan ada juga yang tidak mendaftarkan pekerjaanya ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan pekerjaanya merupakan honorer atau pekerja buruh harian lepas yang datang dari daerah.

4.2.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan program. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan program. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila implementor yaitu BPJS Ketenagakerjaan menginformasikan kepada semua

perusahaan beserta pekerjaanya mengenai manfaat yang didapatkan apabila mendaftarkan pekerjaanya kedalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin keberhasilan suatu program.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kurangnya komunikasi antara pimpinan perusahaan dengan kelompok pekerja. Sehingga dapat mengakibatkan kelompok kerja ada yang mengetahui tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan sebagian tidak mengetahuinya. Apalagi mengenai manfaatnya.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Berdasarkan analisis terhadap tiga indikator implementasi kebijakan menurut Charles O' Jones, maka Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa dilihat dari indikator organisasi, sudah berjalan secara optimal. Dibuktikan dengan struktur organisasi yang terbentuk sesuai dengan bidang-bidangnya. Kesiapan, tanggung jawab dan pembagian kewenangan sudah diatur dalam regulasi dari Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Dan dilihat dari segi interpretasi, program jaminan sosial ketenagakerjaan belum berjalan optimal. Dikarenakan masih ada

perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan pekerjaanya merupakan pegawai kontrak maupun buruh harian lepas sehingga dalam pengadministrasian masih kurang. Selain itu, dari pihak pekerjaanya pun belum mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dapat menjadi salah satu penghambat dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi program dalam interpretasi. Dan dilihat dari indikator aplikasi (penerapan) belum berjalan dengan optimal. Dari segi target belum mencapai sasaran, apalagi dimasa pandemic Covid-19. Karena banyak tenaga kerja yang dirumahkan.

2. Dalam implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di kota Pekanbaru yang menjadi faktor penghambatnya yaitu karena adanya edukasi & sosialisasi yang kurang optimal oleh BPJS Ketenagakerjaan serta kurangnya komunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan perusahaan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh pekerja.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Agar program jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai sasaran dan berjalan maksimal, implementor harus memberikan kajian tentang keuntungan mengikuti program BPJS

Ketenagakerjaan dengan menjelaskan manfaat yang akan dirasakan setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemerintah Kota atau Instansi Terkait harus memberikan sanksi tegas ke setiap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. (D. A. Hakim, Ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ari, Atmaja. 2018. Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Kabupaten Kuantan Singingi.
- Ezah, Wan. 2019. Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. (H. el Rais, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A., Pramusinto, A., Kumorotomo, W., Mugesejati, N. P., Widaningrum, A., & Apriliyanti, I. D. (2015). *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. (Andayani & L. Rachmani, Eds.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Rudy & E. Ariyanto, Eds.). Yogyakarta: Gava Media.
- Raden, Dendy. 2015. Strategi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Di Kota Tangerang.
- Resa, Rosita. 2019. Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh (Studi di Kota Mataram)
- Rohman, D. F. H. I. dan H. M. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 962–971.
- Sufiadi, J., Noor, I., & Suryadi. (2015). Implementasi Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin. *Reformasi*, 5(1), 160–168.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2010). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (F. Zulhendri, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (F. Hutari, Ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggaran Jaminan
Sosial